

COVER DEPAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABELError! Bookmark not defined.

PERNYATAAN 4

TANGGUNG JAWAB..... 4

LAPORAN REALISASI ANGGARAN..... 5

LAPORAN OPERASIONAL 6

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 7

NERACA..... 9

CATATAN ATAS 10

LAPORAN KEUANGAN..... 10

BAB I..... 11

PENDAHULUAN 11

 1.1. Maksud dan Tujuan 11

 1.2. Landasan Hukum 12

 1.3. Sistematika Penulisan 13

BAB II..... 15

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD..... 15

 2.1 Ekonomi Makro..... 15

 2.2 Kebijakan Keuangan..... 23

 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja 23

BAB III 27

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 28

 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan..... 28

 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 35

BAB IV 36

KEBIJAKAN AKUTANSI..... 36

 4.1 Entitas Akuntansi..... 36

 4.2 Basis Akuntansi 36

 4.3 Basis Pengukuran 36

 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi..... 37

 4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi 37

 4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan. 37

BAB V 45

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 45

 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD..... 45

DAFTAR TABEL

2.1.1 Tabel Ekonomi Makro 1 15

2.3.1 Tabel Pencapaian Target Kinerja 1 24

Tabel Penyajian Aset 1 41

Tabel Ekuitas 1 44

Tabel Belanja 1 46

Tabel Belanja Barang dan Jasa 1469

Tabel Belanja Modal 1 49

Tabel Beban LO 1..... 51

Tabel Aset 1 52

Tabel Aset Tetap 1..... 54

Tabel Struktur Organisaais 1..... 59

Tabel Sumber Daya Manusia 1 61

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan pengelolaan keuangan selama TA 2023 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).

- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasioanl).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang APBD TA. 2024;

13. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/16598-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Awal Tahun Anggaran 2024 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban

5.1.7. Ekuitas

- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya¹, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,28. Tingkat inflasi ini melampaui tingkat inflasi nasional yang hanya sebesar 1,87. Tingginya tingkat inflasi ini tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021. Keadaan ekonomi makro ini cukup membebani kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai representatif dari pengaplikasian misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya.

Ekonomi makro yang kurang menguntungkan ini berkorelasi negatif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan tidak adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya pergeseran APBD. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 967.360.048,- dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp. 31.802.815.364,-, pergeseran anggaran belanja sebesar 3,04%. Melalui pergeseran anggaran ini diharapkan melalui keterbatasan anggaran yang ada, pelayanan kepada masyarakat dapat tetap diberikan secara maksimum. Adapun pergeseran anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

2.1.1 Tabel Ekonomi Makro 1

Kode Progr am	Kode Kegiata n	Kode Sub Kegiat an	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01			Perencanaan, Penganggaran,	481.290.000	-	210.000.000	271.290.000

			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.950.000			79.950.000
01	06		Koori dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	401.340.000		210.000.000	191.340.000
02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.036.736.114			10.036.736.114
02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.036.736.114			10.036.736.114
05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.112.500	84.579.000		180.691.500
05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.112.500	84.579.000		180.691.500
06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.870.311.650		168.531.800	3.701.779.850
06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.121.100			19.121.100
06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.492.400			48.492.400
06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.620.400			34.620.400
06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	208.495.750		85.151.700	123.344.050

06	09		Penyelenggaraan Rapat Koori dan Konsultasi SKPD	3.559.582.000		83.380.100	3.476.201.900
07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.182.660.000	1.230.486.100		2.413.152.100
07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	1.123.750.000		1.123.750.000
07	05		Pengadaan Mebel	68.112.600			68.112.600
07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	428.814.500			428.814.500
07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	685.738.900	106.736.100		792.475.000
08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.966.951.000	135.085.948		3.102.036.948
08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.385.000			17.385.000
08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	293.720.800	35.855.948		329.576.748
08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.665.845.200	99.230.000		2.755.075.200
09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.010.878.400	30.609.000		1.041.487.400

			Pemerintahan Daerah				
09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	272.124.400	30.609.000		302.733.400
09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.274.000			30.274.000
09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.530.000			599.530.000
09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000			10.150.000
09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.800.000			98.800.000
2.1.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.549.781.000			2.549.781.000
2.1.01	02		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1.643.057.000			1.643.057.000
2.1.01	03		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	259.032.000			259.032.000

			dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				
2.1.01	04		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	147.180.000			147.180.000
2.1.01	05		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	402.762.000			402.762.000
2.1.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	97.750.000			97.750.000
2.1.02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	926.470.000			926.470.000
2.1.02	02		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	570.870.000			570.870.000
2.1.02	03		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	355.600.000			355.600.000
2.1.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.901.000.000	566.500.000		4.467.500.000
2.1.03	01		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	550.000.000	166.500.000		716.500.000
2.1.03	02		Penelitian dan Pengembangan	650.000.000			650.000.000

			Perindustrian dan Perdagangan				
2.1.03	04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	350.000.000			350.000.000
2.1.03	06		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1.541.000.000	200.000.000		1.741.000.000
2.1.03	10		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	330.000.000			330.000.000
2.1.03	12		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	480.000.000	200.000.000		680.000.000
2.1.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.780.618.700			4.780.618.700
2.1.04	01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2.021.672.500			2.021.672.500
2.1.04	02		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	744.261.000			744.261.000
2.1.04	03		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.541.543.200			1.541.543.200
2.1.04	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	311.564.000			311.564.000
2.1.04	05		Fasilitasi Hak	161.578.000			161.578.000

			Kekayaan Intelektual				
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas berbeda dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan Permendagri yang semula didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pada tahun 2021 BALITBANGDA memiliki 11 program dan 37 kegiatan dengan rinciaan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koori dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
11. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2023.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp. 30.471.543.612,- nilai ini tidak mencapai target sebesar Rp. 33.471.543.612,- atau sebesar 91,36%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp.12.878.469.767 atau sebesar 62,72% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp. 17.699.521.835,-. Adapun penjelasan atas kenaikan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

2.3.1 Tabel Pencapaian Target Kinerja 1

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target
01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.290.000	31 Dokumen
01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.950.000	10 Dokumen
01	06		Koori dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	191.340.000	24 Laporan
02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.036.736.114	14 Dokumen
02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.036.736.114	46 Orang/Bulan
05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.691.500	20 Dokumen
05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.691.500	25 Orang
06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.701.779.850	20 Dokumen
06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.121.100	1 Paket
06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.492.400	1 Paket
06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.620.400	1 Paket
06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.344.050	1 Paket
06	09		Penyelenggaraan Rapat Koori dan Konsultasi SKPD	3.476.201.900	12 Laporan
07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.413.152.100	15 Unit
07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.123.750.000	2 Unit
07	05		Pengadaan Mebel	68.112.600	2 Paket
07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	428.814.500	30 Unit
07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	792.475.000	41 Unit

08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.102.036.948	12 Bulan
08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.385.000	12 Laporan
08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.576.748	12 Laporan
08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.755.075.200	31 Laporan
09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.041.487.400	5 Kegiatan
09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	302.733.400	6 Unit
09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.274.000	61 Unit
09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.530.000	2 Unit
09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000	1 Unit
09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.800.000	1 Unit
2.1.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.549.781.000	100 %
2.1.01	02		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1.643.057.000	4 Laporan
2.1.01	03		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	259.032.000	1 Laporan
2.1.01	04		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	147.180.000	2 Laporan
2.1.01	05		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	402.762.000	3 Laporan
2.1.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	97.750.000	1 Dokumen
2.1.02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	926.470.000	100 %

2.1.02	02		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	570.870.000	4 Laporan
2.1.02	03		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	355.600.000	2 Laporan
2.1.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4.467.500.000	100 %
2.1.03	01		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	716.500.000	2 Dokumen
2.1.03	02		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	650.000.000	2 Dokumen
2.1.03	04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	350.000.000	1 Dokumen
2.1.03	06		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1.741.000.000	7 Dokumen
2.1.03	10		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	330.000.000	2 Dokumen
2.1.03	12		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	680.000.000	3 Dokumen
2.1.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.780.618.700	100 %
2.1.04	01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2.021.672.500	5 Dokumen
2.1.04	02		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	744.261.000	2 Laporan
2.1.04	03		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.541.543.200	4 Laporan
2.1.04	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	311.564.000	3 Laporan
2.1.04	05		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	161.578.000	1 Laporan

Dalam pencapaian target-target tersebut, BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di dan evaluasi berkala melalui

Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2023 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

(mengikuti Program yang ada pada SIPD Penatausahaan sekarang)

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 271.290.000,- pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 165.547.000,- atau 61,02%. Hal ini efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2023.

- ***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (01.01)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 79.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.947.000,- atau 57,47%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2023.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.06)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 191.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.600.000,- atau 62,51% efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2023.

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (02)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 10.036.736.114,- pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.8.698.529.161,- atau 86,67%. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang meninggal dunia, pensiun dan jabatan yang kosong pada Tahun 2023.

- ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (02.01)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.036.736.114,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.698.529.161,- atau 86,67%. hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang meninggal dunia, pensiun dan jabatan yang kosong pada Tahun 2023.

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (05)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 180.691.500,- pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.162.646.274,- atau 90,01%. Hal ini disebabkan

karena adanya pegawai yang meninggal dunia, pensiun dan jabatan yang kosong pada Tahun 2023.

- ***Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (05.09)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 180.691.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 162.646.274,- atau 90,01%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• **Administrasi Umum Perangkat Daerah (06)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 3.701.779.850,- pada Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.3.603.816.196,- atau 97,35%. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang meninggal dunia, pensiun dan jabatan yang kosong pada Tahun 2023.

- ***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (06.01)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.121.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.100.000,- atau 73,74%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (06.02)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 48.492.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.490.000,- atau 93,81%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (06.03)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.620.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.361.000,- atau 99,26%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (06.05)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 123.344.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 104.606.500,- atau 84,81%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (06.09)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.476.201.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.405.255.696,- atau 97,96%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (07)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.413.152.100,- pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.2.307.580.000,- atau 95,63%. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang meninggal dunia, pensiun dan jabatan yang kosong pada Tahun 2023.

- *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (07.01)*

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.123.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.084.750.000,- atau 96,53%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- *Pengadaan Mebel (07.05)*

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 68.112.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.400.000,- atau 98,95%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (07.10)*

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 428.814.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 424.390.000,- atau 98,97%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (07.11)*

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 792.475.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 731.040.000,- atau 92,25%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (08)*

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 3.102.036.948,- pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 2.931.055.202,- atau 94,49%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- *Penyediaan Jasa Surat Menyurat (08.01)*

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.385.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.710.000,- atau 90,37%. hal ini disebabkan karena banyak surat yang dikirim melalui email.

- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (08.02)*

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 329.576.748,- dan terealisasi sebesar Rp. 289.661.442,- atau 87,89%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (08.04)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.775.075.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.625.683.760,- atau 95,30%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• **Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (09)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 1.041.487.400,- pada Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 975.461.216,- atau 93,66%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (09.02)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 302.733.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 242.085.716,- atau 79,97%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (09.06)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.274.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.455.500,- atau 97,30%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (09.09)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 599.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 596.920.000,- atau 99,56%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (09.10)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 98,52%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (09.11)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 98.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.000.000,- atau 98,18%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan**

Pengkajian Peraturan (2.1.01)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.549.781.000,- pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 2.240.124.306,- atau 87,86%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum (2.1.01.2)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.643.057.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.383.410.438,- atau 84,20%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (2.1.01.3)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 259.032.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 249.778.340,- atau 96,43%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (2.1.01.4)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 147.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 142.388.767,- atau 96,74%. hal ini efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (2.1.01.5)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 402.762.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 371.155.887,- atau 92,15%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (2.1.01.12)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 97.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.390.874,- atau 95,54%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (2.1.02)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.926.470.000,- pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.852.759.409,- atau 92,04%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (2.1.02.2)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 570.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 521.082.535,- atau 91,28%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (2.1.02.3)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 355.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 331.676.874,- atau 93,27%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• ***Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (2.1.03)***

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 4.467.500.000,- pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 4.276.960.164,- atau 95,73%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2.1.03.1)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 716.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 672.354.671,- atau 93,84%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (2.1.03.2)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 650.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 638.638.968.889,- atau 98,30%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (2.1.03.4)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 346.997.044,- atau 96,96%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (2.1.03.6)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.741.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.660.146.479,- atau 95,36%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penelitian dan Pengembang Perhubungan (2.1.03.10)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 330.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 314.914.820,- atau 95,43%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penelitian dan Pengembang Penataan Ruangn dan Pertanahan (2.1.03.12)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 680.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 643.578.261,- atau 94,64%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• ***Pengembangan Inovasi dan Teknologi (2.1.04)***

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 4.780.618.700,- pada Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 4.363.512.674,- atau 91,28%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi(2.1.04.1)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.021.972.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.939.656.888,- atau 95,94%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangunan/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (2.1.04.2)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 744.261.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 534.458.397,- atau 71,81%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah yang Bersifat Inovatif (2.1.04.3)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.541.543.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.469.275.405,- atau 95,31%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (2.1.04.4)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 311.564.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 294.086.681,- atau 94,39%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (2.1.04.5)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 161.578.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.035.300,- atau 78,00%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tia bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi

yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan

Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.

- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- **Defenisi**

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- Defenisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Defenisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Defenisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain

4.4.2.5 Aset

- **Defenisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat di kapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - a. Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan
Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

Tabel Penyajian Aset 1
ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

- Kas di Kas Daerah
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di BLUD
- Kas di Bendahara FKTP
- Kas di Bendahara BOS
- Kas Lainnya
- Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

- Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

- Piutang Pajak Daerah
- Piutang Retribusi
- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah
- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- Uang Muka
- Panjar Kegiatan
- Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

- Penyisihan Piutang Pendapatan
- Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

- Beban Pegawai Dibayar Dimuka
- Beban Barang Dibayar Dimuka
- Beban Jasa Dibayar Dimuka
- Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
- Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

- Persediaan Bahan Pakai Habis
- Persediaan Bahan/Material
- Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

- Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
- Investasi dalam Obligasi
- Investasi dalam Proyek Pembangunan
- Dana Bergulir
- Deposito Jangka Panjang

- Investasi Non Permanen Lainnya
- Investasi Jangka Panjang Permanen**
 - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
 - Investasi Permanen Lainnya
- ASET TETAP**
 - Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan Bangunan
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - Aset Tetap Lainnya
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Akumulasi Penyusutan
- ASET LAINNYA**
 - Tagihan Jangka Panjang
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - Aset Tidak Berwujud
 - Aset Lain-lain
 - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
 - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.4.2.6 Kewajiban

- **Defenisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.
- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakn tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penyajian Kewajiban 1

▪ KEWAJIBAN
▪ KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
▪ Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya
- **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Defenisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Ekuitas 1

- **EKUITAS**
 - EKUITAS
 - Surplus/Defisit-LO
 - Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2023.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan pada BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tidak memiliki Pendapatan dikarenakan dengan berlakunya Permendagri Nomor :12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pada tahun 2018 kegiatan pelayanan pengujian laboratorium bidang konstruksi diberhentikan sampai dengan terbitnya kebijakan dari peraturan Gubernur Kalimantan Timur terkait eksistensi UPTB-BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp **30.471.543.612** terealisasi sebesar Rp. **30.577.991.602** atau sebesar 91,36%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada

tahun 2023 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Belanja 1

Uraian	31 Desember 2023		(%)	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	33.471.543.612	30.577.991.602	91,36	17.699.521.835	57,88
<i>Belanja Operasi</i>	30.171.550.512	27.332.859.624	90,59	17.145.195.255	62,72
Belanja Pegawai	10.337.756.114	8.988.929.161	86,95	8.570.035.068	9,5
Belanja Barang dan Jasa	19.833.794.398	18.343.930.463	92,49	8.575.160.187	231
Belanja Hibah					
Belanja Bantuan Sosial					
<i>Belanja Modal</i>	3.299.993.100	3.245.131.978	98,34	554.326.580	170
Belanja Modal Tanah					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.283.993.100	3.229.331.978	98,34	280.552.020	868
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	167.716.560	(100)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.000.000	15.800.000	98,75	106.058.000	(100)

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 100%. Dari target sebesar Rp. 30.171.550.512,- terealisasi sebesar Rp 27.332.859.624 atau 90,59%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Belanja Operasi 1

Uraian	31 Desember 2023		(%)	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<i>Belanja Operasi</i>	30.171.550.512	27.332.991.602	90,59	17.145.195.255	62,72
Belanja Pegawai	10.337.756.114	8.988.929.161	86,95	8.570.035.068	9,5
Belanja Barang dan Jasa	19.833794.398	18.343.930.463	85,97	8.575.160.182	231

▪ Belanja Pegawai

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. **10.337.756.114** untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terrealisasi sebesar Rp. **8.988.929.161** atau sebesar **86,95%**.

Tabel Beanja Pegawai 1

Uraian	31 Desember 2023		(%)	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Pegawai</u>	10.337.756.114	8.988.929.161	86,95	8.570.035.068	9,5
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.869.616.114	3.219.949.161	83,21	3.303015.277	-
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.167.120.000	5.478.580.000	88,84	5.090.789.791	-
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH					
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan					
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah					

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1.348.826.953 atau sebesar 13,05% disebabkan oleh 1. Adanya Pegawai yang Pensiun.



▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2023 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menggabungkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp. atau sebesar%.

Tabel Belanja Barang dan Jasa 1

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
Belanja Barang dan Jasa	19.833.794.398	18.343.930.463	92,49	8.575.160.187
Belanja Barang	2.586.031.130	2.350.201.384	90,88	1.337.445.699
Belanja Barang Pakai Habis	2.586.031.130	2.350.201.384	90,88	1.337.445.699
Belanja Jasa	7.091.668.748	6.096.807.764	85,97	3.118.259.478
Belanja Jasa Kantor	6.504.903.148	5.551.378.730	85,34	2.940.239.734
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	173.875.200	159.733.760	91,87	124.739.744
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	33.330.000	29.970.000	89,92	0
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	92.352.000	89.400.000	96,80	0
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0	0	53.280.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	282.312.000	263.846.274	93,46	0
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	4.896.400	2.479.000	50,63	0
Belanja Pemeliharaan	833.173.000	826.855.750	99,24	525.703.660
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134.843.000	132.935.750	98,59	31.454.760
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	698.330.000	693.920.000	99,37	485.248.900
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0	9.000.000
Belanja Perjalanan Dinas	9.297.221.520	9.044.365.565	97,28	3.593.751.350
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.281.450.000	8.074.998.171	97,51	3.449.271.550
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.015.771.520	969.367.394	95,43	144.479.800
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.700.000	25.700.000	100	0

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.700.000	25.700.000	100	0
---	------------	------------	-----	---

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.489.863.935 atau sebesar 7,51% disebabkan oleh karena adanya efisiensi dari kegiatan tahun 2023.

5.1.2.2 Belanja Modal

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. **3.299.993.100**. untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terrealisasi sebesar Rp. **3.245.131.978** atau sebesar **98,34** %.

Tabel Belanja Modal 1

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
BELANJA MODAL	3.299.993.100	3.245.131.978	98,34	554.326.580
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.283.993.100	3.229.331.978	98,34	280.552.020
Belanja Modal Alat Besar	650.000.000	650.000.000	100	0
Belanja Modal Alat Besar Darat	650.000.000	650.000.000	100	0
Belanja Modal Alat Angkutan	1.123.750.000	1.084.750.000	96,53	2.540.000
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.123.750.000	1.084.750.000	96,53	2.540.000
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	196.360.100	192.240.000	97,90	55.990.000
Belanja Modal Alat Kantor	124.611.300	121.000.000	97,10	0
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	64.428.200	64.340.000	99,86	55.990.000
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.320.600	6.900.000	94,25	0
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	42.993.500	42.700.000	99,32	0
Belanja Modal Alat Studio	42.993.500	42.700.000	99,32	0
Belanja Modal Alat Laboratorium	653.744.000	647.751.978	99,08	0
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	650.000.000	644.091.978	99,09	0
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.744.000	3.660.000	97,76	0
Belanja Modal Komputer	617.145.500	611.890.000	99,15	222.022.020
Belanja Modal Komputer Unit	323.455.500	319.390.000	98,74	185.877.020
Belanja Modal Peralatan Komputer	293.690.000	292.500.000	99,59	36.145.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	167.716.560
Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0	0	167.716.560
Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0	0	167.716.560

Tempat Kerja				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.000.000	15.800.000	98,75	106.058.000
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	16.000.000	15.800.000	98,75	0
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	16.000.000	15.800.000	98,75	0
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0	0	106.058.000
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0	0	106.058.000

Belanja modal sebesar Rp. 3.245.131.978 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Unit Komputer dan Laptop
- Unit Printer
- Meja & Kursi
- Pembuatan Taman
- Workshop
- Pembuatan CWS
- Video Wall
- Pengadaan CCTV
- Pengadaan Drone
- Pengadaan Camera

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp. 54.861.122 atau sebesar 1,66% disebabkan oleh karena adanya efisiensi dari kegiatan tahun 2023.

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2023 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pendapatan LO.

5.1.4 Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2023 sebesar Rp. 27.376.641.701,- Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 17.300.654.154,33,- maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 10.075.987.546,67,- Atau 58,24%. Rincian Beban LO tahun 2023 komparasian dengan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel Beban LO 1

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Beban LO				
BEBAN	27.376.641.701	17.300.654.154,33	10.075.987.546,67	58,24
BEBAN OPERASI	27.340.814.101	17.156.483.809	10.184.330.292	59,36
Beban Pegawai	8.988.929.161	8.570.035.068	418.894.093	4,89
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.219.949.161	3.303.015.277	(83.066.116)	(2,51)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.478.580.000	5.090.789.791	387.790.209	7,62
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	290.400.000	176.230.000	114.170.000	64,78
Beban Barang dan Jasa	18.351.884.940	8.586.448.741	9.765.436.199	113,73
Beban Barang	2.359.641.074	1.342.028.265	1.017.612.809	75,83
Beban Jasa	6.095.322.551	3.124.965.466	2.970.357.085	95,05
Beban Pemeliharaan	826.855.750	525.703.660	301.152.090	57,29
Beban Perjalanan Dinas	9.044.365.565	3.593.751.350	5.450.614.215	151,67
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.700.000	0	25.700.000	100
JUMLAH BEBAN OPERASI	27.340.814.101	17.156.483.809	10.184.330.292	59,36
Beban Penyusutan dan Amortisasi	35.827.600	144.170.345,33	(108.342.745,33)	(75,15)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	42.908.506	(42.908.506)	-100
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	94.646.206	(94.646.206)	-100
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	35.827.600	6.615.633,33	29.211.966,67	441,56

5.1.4.1 Beban Operasi

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menanggung beban operasi sebesar Rp. 27.340.814.101 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 17.300.654.154,33, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 10.075.987.546,67 Atau 58,24%. Rincian Beban Operasi tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2023

dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp. 418.894.093 atau sebesar (4,89%), hal ini disebabkan antara lain:

- Terisinya Jabatan yang Kosong.
- Kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai

5.1.4.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 9.765.436.199 atau sebesar 113,73%, hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya Kenaikan Anggaran Tahun 2023

5.1.4.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Bila Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi Penurunan sebesar (Rp. 108.342.745,33) atau sebesar 75,15%, hal ini disebabkan antara lain:

- Penyusutan ATB selama periode 1 Tahun

5.1.5. Aset

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp. 5.130.277.246,- pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp. 4.830.987.440,-, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 299.289.806,- atau 6%. Rincian pendapatan aset tahun 2021 beserta komparasian dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel Aset 1

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset			
Aset Lancar			
- Kas di Bendahara Penerimaan			

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Kas di Bendahara Pengeluaran			
- Kas di BLUD			
- Kas Lainnya			
- Piutang Pajak			
- Piutang Bukan Pajak			
- Piutang Retribusi			
- Piutang Lainnya			
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
- Persediaan	980.000	10.419.690	(106,23)
- Belanja dibayar dimuka			
Aset Non lancar			
- Investasi Jangka Panjang	0	0	
- Aset Tetap	7.683.001.738	4.453.669.760	57,96
- Aset Lainnya	796.982.466,67	831.922.066,67	(10,4)

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2023 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp 980.000 Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 10.419.690, maka dapat diketahui terdapat Penurunan sebesar Rp. 9.439.690,- Atau (106,23)%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1 Persediaan

Persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 980.000,- bila dibandingkan dengan Persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 10.419.690, maka dapat diketahui terdapat Penurunan sebesar Rp. 9.439.690,- Atau (106,23)%. Hal ini dikarenakan efisiensi.

5.1.5.2. Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp 5.430.029.028,-. Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 4.840.585.848,-, maka dapat diketahui terdapat kenaikan penurunan sebesar Rp. 589.443.180,- Atau 23,17%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2023 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp 7.683.001.738,- Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp. 4.453.669.760,-, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.229.331.978,- Atau 57,96%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel Aset Tetap 1

Uraian	2022	Bertambah	Berkurang	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap					
Tanah	0			0	
Peralatan dan Mesin	8.892.460.276	3.229.331.978	0	12.121.792.254	73,35
Gedung dan Bangunan	4.700.839.990	0	0	4.700.839.990	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	
Aset Tetap Lainnya	110.223.000	0	0	110.223.000	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	167.716.560	0	0	167.716.560	0
Akumulasi Penyusutan	(9.280.015.354)			(9.280.015.354)	0

5.1.5.2.1.1. Tanah

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah yang menjadi aset dikarenakan pada tahun 2019 sudah di limpahkan kepada OPD lain (PUPR Prov. Kaltim).

5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp 12.121.792.254,- Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp. 8.892.460.276, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.229.331.978,- Atau 3,22%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

Belanja Modal	: Rp. 3.229.331.978
Hibah	: Rp.
Reklasifikasi dari	: Rp.
Revaluasi	: Rp.

Pengurangan

Rusak Berat	: Rp.
Dihapuskan	: Rp.
Reklasifikasi dari	: Rp.
Nilai dibawah Kapitalisasi:	Rp.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp. 1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable).

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp 4.700.839.990,- Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 4.700.839.990,-, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan gedung dan bangunan selama tahun anggaran 20223.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

5.1.5.2.1.4 Aset Tetap Lainnya

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 110.223.000,-. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 110.223.000,-, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan Aset Tetap Lainnya selama tahun anggaran 2023

5.1.5.2.1.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 167.716.560,-. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 167.716.560,-, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun anggaran 2023.

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2023 akumulasi penyusutan atas aset tetap Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur belum bisa disajikan karena belum melakukan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2023 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp 828.384.866,-. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 680.087.700,-, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 148.297.166 Atau 21,80%. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat dikarenakan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp.21.850.060,- per 31 Desember 2023. Pada akhir tahun 2023 terdapat kewajiban sebesar Rp. 21.850.060,- Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 23.335.273, maka dapat diketahui terdapat Penurunan sebesar Rp. 1.485.213 atau 10,67%. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1 Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2023 terdapat Utang beban sebesar Rp. 21.850.060,-. Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 23.335.273,-, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 1.485.213 atau 10,67%. Kenaikan/penurunan tersebut disebabkan oleh efisiensi.

5.1.7 Ekuitas

Kekayaan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.459.114.144,- Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2023 terdapat ekuitas sebesar Rp. 8.459.114.144,- Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp. 5.272.676.243,- , maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.186.437.901,- atau 62,33%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya belanja modal tahun 2023.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

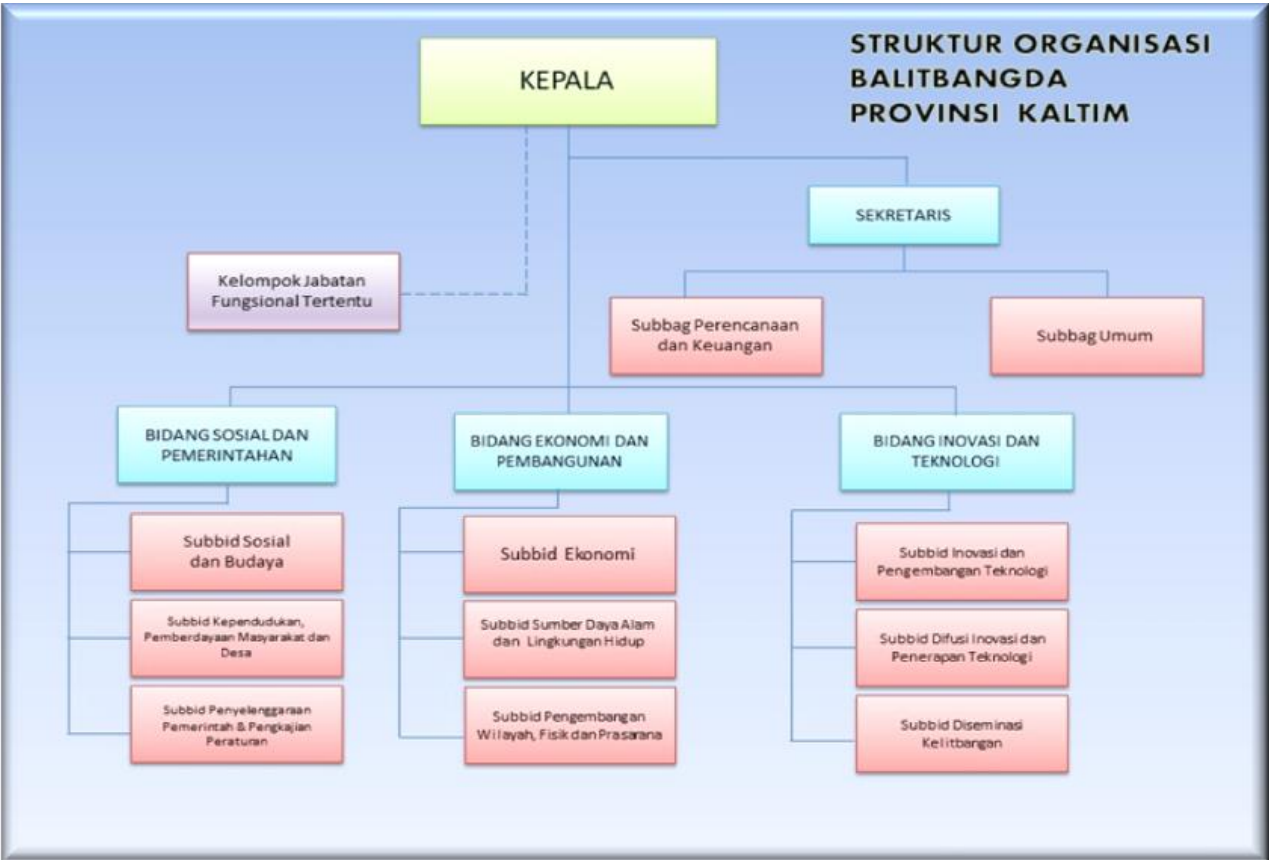
6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Mt. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih kabupaten/kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki UPTD/B sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan.

Pada tahun 2021 Balitbangda tidak memiliki Pendapatan dikarenakan dengan berlakunya Permendagri Nomor :12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pada tahun 2018 kegiatan pelayanan pengujian laboratorium bidang konstruksi **diberhentikan** sampai dengan terbitnya kebijakan dari peraturan Gubernur Kalimantan Timur terkait eksistensi UPTB-BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim, capaian kinerja Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi beroperasi sampai akhir bulan Juni Tahun 2018.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

Tabel Struktur Organisasi 1



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasinal layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan sebagai berikut:

➤ Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang menjadi tanggungjawab Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas yang

diberikan maka Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan pemerintahan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan pembangunan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel Sumber Daya Manusia 1

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala		1				
Kepala Bidang		3	1			
Kepala Sub Bidang		2	9			
Peneliti		11	1			
Staf			2		3	12
Jumlah						

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 29 Januari 2024
Kepala BALITBANGDA Provinsi
Kalimantan Timur ,

Dr. M. Ir. H. Fitriansyah, S.T., M.M
Pembina Tingkat Utama Muda
NIP. 19731127 200604 1 009

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2022
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2022 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2022 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2022
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2022 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2022
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2022 yang ditagih / dibayar tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2022 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2022 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2022 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Penjualan Aset-Aset hasil lelang tahun 2022 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2022 dengan tanggal cetak diatas 31 desember 2022 dengan Validasi Bank
Lampiran XV	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2022 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2022 (yang telah diotorisasi)

Lampiran XVII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVIII	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIX	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2022 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XX	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2022 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2022 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2022 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXIII	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXIV	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2022
Lampiran XXVI	Rekapitulasi sewa dibayar dimuka/Asuransi dibayar dimuka (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXVII	Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran XXVIII	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2022 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXIX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)